

II. TELAAH PUSTAKA

2.1. Koperasi Sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat

Koperasi merupakan salah satu bentuk kelembagaan di antara sekian banyak kelembagaan yang berperan dalam pengembangan sektor pertanian, seperti halnya berbagai bentuk asosiasi petani seperti asosiasi petani tebu, dan asosiasi petani kopi. Namun demikian ada suatu hal yang membedakan antara lembaga koperasi dengan kelembagaan lainnya tersebut, yaitu pada koperasi terdapat ciri *double identity*. Ciri ini menjelaskan bahwa para anggota koperasi merupakan para *owner* sekaligus *customer* dari lembaga tersebut. Perbedaan ini terlihat dengan adanya unit usaha ekonomi yang dimiliki dan diawasi bersama secara demokratis dengan satu tujuan yaitu melayani kebutuhan anggota (Hanel, 1992). Definisi koperasi dapat dilihat secara tekstual pada pasal 1 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Secara umum definisi tersebut memberikan gambaran bahwa koperasi merupakan bentuk dari gerakan ekonomi rakyat. Kekhasan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah aktivitasnya dilandasi dengan asas kekeluargaan. Artinya, koperasi ala Indonesia memiliki dua kata kunci, ekonomi rakyat dan kekeluargaan. Mudah-mudahan, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat memerlukan definisi operasionalnya sendiri, sesuai realitas masyarakat Indonesia.

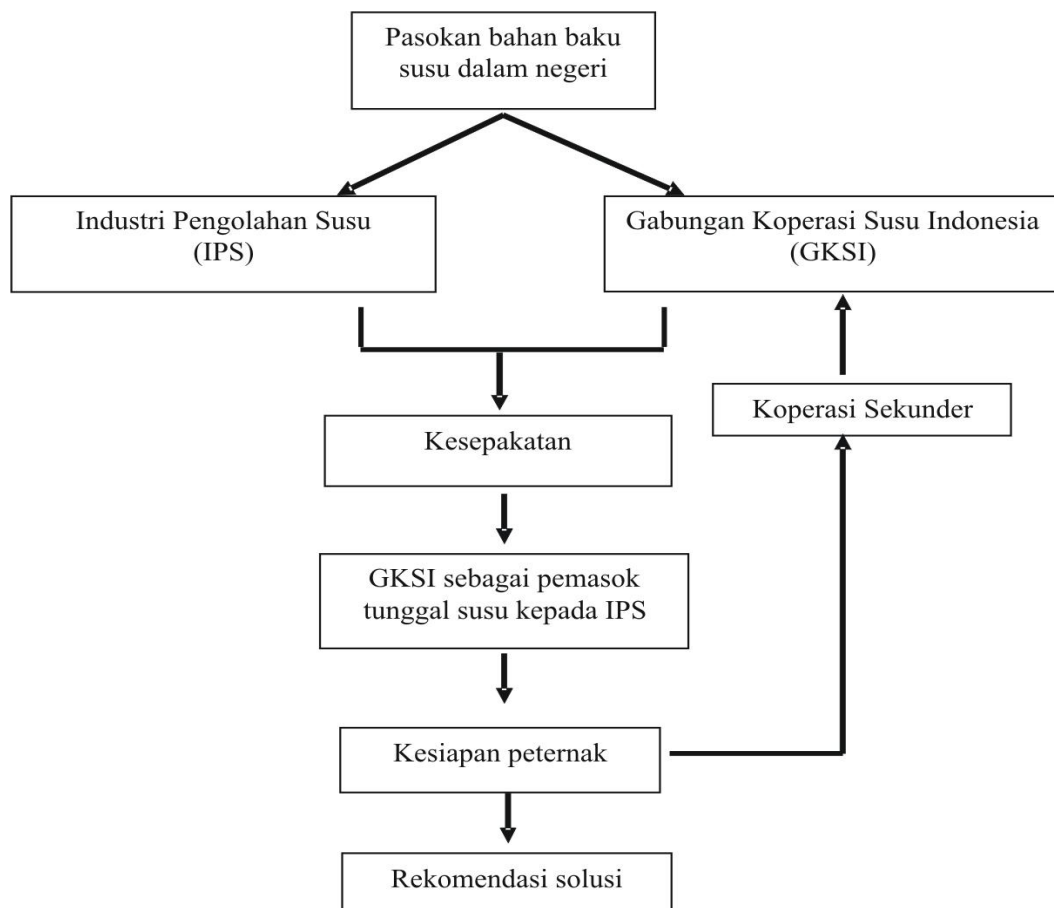
2.2. Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) : Titik Balik Perkembangan Koperasi Susu

Istilah koperasi pertanian pernah tercatat dalam sejarah perkoperasian Indonesia, yaitu sebelum dicanangkannya KUD sebagai satu-satunya koperasi yang diizinkan beroperasi di pedesaan pada tahun 1984 (Djohan, 1997). Koperasi dalam memproduksi susu segar bermitra dengan peternak rakyat yang menjadi anggota koperasi. Sebagai anggota koperasi, peternak adalah juga pemegang saham melalui simpanan wajib dan simpanan pokok dan sebagainya. Dengan

demikian keberhasilan koperasi dalam bisnis susu segar secara langsung merupakan keberhasilan para peternak anggota itu sendiri. Sebaliknya jika terjadi mismanajemen dalam pengurusan koperasi akan merugikan perkembangan peternak anggota koperasi. Di dalam sejarahnya yang panjang, dapat dikatakan titik balik perkembangan koperasi susu di Indonesia dimulai pada tahun 1978, dimana terbentuknya Badan Koordinasi Koperasi Susu Indonesia (BKCSI) yang merupakan cikal bakal GKSI yang dibentuk setahun berikutnya. Dengan kelembagaan koperasi persusuan di level nasional, komunikasi antara gerakan koperasi persusuan dengan pemerintah berjalan lebih baik sehingga memungkinkan beroperannya subsistem penunjang agribisnis susu di Indonesia.

2.3. Kerangka Operasional Pemikiran Kritis

Berikut adalah kerangka operasional pemikiran kritis penulis dalam menyusun karya tulis ini :



Gambar 2.1. Kerangka Operasional Pemikiran Kritis